

HUBUNGAN PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR DENGAN KEBIJAKAN FISKAL, ZAKAT, DAN INFAK

Asyari Hasan¹⁾, Adelia Putri Syahwa²⁾, Salwa Dhaifina Fitria³⁾,
Srinalia Meutia Wardah⁴⁾, Sunarsih⁵⁾

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

asyari.hasan@uinjkt.ac.id¹⁾, adeliaputri.syahwa21@mhs.uinjkt.ac.id²⁾,
salwa.dhaifina21@mhs.uinjkt.ac.id³⁾, meutia.wardah21@mhs.uinjkt.ac.id⁴⁾
sunarsih.nasution21@mhs.uinjkt.ac.id⁵⁾

Abstrak. Perekonomian tiga sektor, yang juga dikenal sebagai perekonomian tertutup, mengacu pada sebuah sistem ekonomi di mana tidak ada perdagangan internasional yang terjadi. Dalam konteks ini, ekspor dan impor dianggap tidak ada. Karya tulis ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber yang tertulis seperti artikel, jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian. Hasil kajian pustaka mencakup pembahasan tentang konsep dasar ekonomi 3 sektor, termasuk definisinya, peran pemerintah dalam ekonomi sektor, serta aliran pendapatan dalam perekonomian tiga sektor. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas keseimbangan pendapatan nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi. Hal ini melibatkan syarat-syarat keseimbangan pendapatan nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi, serta keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor melalui kebijakan fiskal seperti pajak lump sum dan proporsional, serta subsidi. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang efek multiplier pada ekonomi 3 sektor, termasuk multiplier *invest* (I), pengeluaran pemerintah atau *consumption* (C), dan pajak atau *tax* (T). Terakhir, penelitian ini mencakup keseimbangan perekonomian tiga sektor dengan mempertimbangkan variabel zakat dan infaq. Hal ini melibatkan pengaruh zakat pada sektor pemerintah, perusahaan, dan rumah tangga.

Kata kunci. Pemerintah, Pajak, Subsidi, Keseimbangan, Zakat.

Abstract. A tri-sector economy, also known as a closed economy, refers to an economic system in which no international trade takes place. In this context, exports and imports are considered non-existent. This paper was prepared using the literature research method, which involves collecting data and information from written sources such as articles, journals, books, and other related documents that are pertinent to the discussion in the study. The results of the literature review include a discussion of the basic concepts of a three-sector economy, including its definition, the role of government in a three-sector economy, and the flow of income in a three-sector economy. Furthermore, this study also discusses national income equilibrium with fiscal policy and subsidies. This involves the requirements of national income equilibrium with fiscal policy and subsidies, as well as equilibrium in a three-sector economy through fiscal policies such as lump sum and proportional taxes, and subsidies. In addition, this study also discusses the multiplier effects on the three-sector economy, including the multipliers of investment (I), government spending (C), and tax (T). Lastly, this study

covers the three-sector economy equilibrium by considering zakat and infaq variables. This involves the effect of zakat on the government, corporate, and household sectors.

Keywords. *Government, Taxes, Subsidies, Balance, Zakat*

PENDAHULUAN

Perekonomian yang terdiri dari tiga sektor atau bagian dikenal sebagai "perekonomian tertutup", yang berarti dianggap tertutup terhadap perdagangan internasional sehingga tidak ada ekspor dan impor. Perekonomian tiga sektor melibatkan elemen pemerintah, berbeda dengan perekonomian dua sektor. Pajak dan subsidi akan menjadi dua variabel baru dalam perhitungan pendapatan nasional ketika peran pemerintah muncul. Pajak memindahkan sektor publik dari sektor pribadi, baik badan maupun individu. Dalam situasi seperti ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang mendistribusikannya. Pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, tetapi juga bertindak sebagai distributor, menyediakan layanan publik kepada publik. Pengeluaran pemerintah yang dikenal sebagai *transfer* atau subsidi diberikan kepada individu untuk tujuan tertentu dan tidak diwajibkan untuk mengembalikannya. *Transfer* meningkatkan pendapatan masyarakat atau konsumen. Mereka dapat berupa jaminan sosial, tunjangan pengangguran, hibah, bantuan, atau hadiah.

Zakat dapat memengaruhi distribusi pendapatan rumah tangga dan perusahaan dalam konteks hubungan antara zakat dan ekonomi tiga sektor. Zakat, yang berasal dari kata "membersihkan", adalah ibadah sosial-ekonomi yang mewajibkan seseorang muslim atau badan hukum untuk memberikan sebagian hak mereka kepada pihak yang berhak untuk menerimanya (mustahik) untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang adil. Rumah tangga dan bisnis dapat memberikan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, yang nantinya di kemudian hari, akan menumbuhkan permintaan atas barang dan jasa yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan dana zakat untuk meningkatkan pelayanan publik dan membantu mereka yang membutuhkan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kajian pustaka atau yang sering disebut sebagai *library research* merupakan salah satu metode penelitian yang populer digunakan dalam dunia akademik. Metode ini

melibatkan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti artikel, jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan dalam penelitian. Penelitian dengan metode kajian pustaka dimulai dengan identifikasi topik atau masalah penelitian yang akan diteliti. Kemudian, peneliti akan melakukan pencarian dan pengumpulan bahan pustaka yang terkait dengan topik tersebut. Pengumpulan bahan pustaka dapat dilakukan secara manual maupun melalui pencarian online menggunakan mesin pencari seperti *Google Scholar*, *ProQuest*, atau database lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perekonomian Tiga Sektor

A. Pengertian Perekonomian Tiga Sektor

Pembahasan tentang ekonomi 3 sektor merupakan pembahasan tentang para pelaku ekonomi dalam cakupan suatu wilayah negara (berskala nasional), yang didalamnya terdapat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah.

Pada kesempatan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana dua sektor ekonomi perusahaan swasta dan rumah tangga berkontribusi pada keseimbangan pendapatan nasional. Namun, pada kenyataannya, aktivitas ekonomi melibatkan pemerintah dan kedua pelaku tersebut. Sebagai konsekuensinya, karena keterlibatan pemerintah dalam perhitungan pendapatan nasional, analisis dibagi menjadi 3 sektor. Perekonomian yang terdiri dari tiga bagian ini dikenal sebagai "perekonomian tertutup", yang berarti tidak ada aktivitas ekspor dan impor karena tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Ini berbeda dengan perekonomian dua sektor, di mana elemen pemerintah dimasukkan ke dalam analisis pendapatan nasional.

B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian Tiga Sektor

Pada ekonomi 3 sektor, pemerintah menjadi pemeran utama dalam pergerakan roda ekonomi suatu negara, dalam hal ini terdapat peran-peran yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Peran Alokasi

Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penyedia instrumen ekonomi yang memiliki manfaat fungsional bagi masyarakat dan tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta. Hal ini mencakup kebutuhan publik seperti infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, pendirian institusi pendidikan, dan peningkatan keamanan. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh negara

pada dasarnya terbatas, sehingga mengharuskan pemerintah, dengan sumber daya yang dimilikinya, untuk memprioritaskan penyediaan barang publik dan mengalokasikan sebagian untuk konsumsi individu.

2. Peran Distribusi

Dalam konteks ini, pemerintah memainkan peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan pendapatan negara untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Menyikapi situasi ini, pemerintah segera mengambil tindakan dengan merancang kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara merata melalui mekanisme pembayaran pajak, subsidi, upaya pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, dan pelaksanaan program pemulihan daerah. Dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjalankan peran fungsionalnya dalam mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula dengan subsidi bagi masyarakat kurang mampu yang didanai melalui penerimaan pajak dan dana pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan jauh, seperti pembangunan proyek-proyek pengentasan kemiskinan.

3. Peran keseimbangan

Dalam konteks ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan keselarasan. Seperti diketahui, perekonomian yang sangat bergantung pada sektor swasta rentan terhadap gejolak kondisi ekonomi yang berpotensi menimbulkan pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan penting sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah tersebut diimplementasikan melalui berbagai strategi dengan tujuan untuk mencegah meluasnya dampak negatif dari permasalahan ekonomi ke sektor-sektor lainnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mengendalikan laju inflasi melalui implementasi kebijakan yang telah dirumuskan. Misalnya, dalam upaya menghadapi monopoli pasar, pemerintah berperan dalam mengendalikannya melalui pelaksanaan pengendalian harga dan penerapan pajak.

4. Peran Negara dalam Mengatasi Eksternalitas

Eksternalitas ekonomi, yang juga dikenal sebagai disekonomi, mengacu pada fenomena di mana terdapat manfaat atau kerugian yang signifikan terhadap pihak-

pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Corner dan Sandler, peneliti terkemuka di bidang ini, menafsirkan eksternalitas sebagai kerangka kerja institusional yang spesifik dalam konteks pasar yang kompetitif. Dalam konteks yang berbeda, eksternalitas mengacu pada konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku ekonomi sebagai akibat dari aktivitas mereka. Dalam implementasinya, efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan.

5. Peran Negara dalam Menerapkan Moralitas Islam

Ekonomi politik Islam menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan ekonomi dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencegah penindasan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan dalam ayat 25 surat Al-Hadid, terdapat penafsiran bahwa fungsi negara adalah untuk menjamin keadilan ekonomi, mengatur pasar, dan menjamin pemenuhan kebutuhan melalui pengaturan infrastruktur dan sistem jaminan sosial.

Kehadiran pemerintah dalam ekonomi 3 sektor ini akan menyebabkan dua variabel baru dalam perhitungan pendapat nasional, berikut ini adalah dua variabel tersebut:

1. Pajak atau *tax*

Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Adanya dasar tersebut, disimpulkan bahwa pajak merupakan kegiatan terjadinya perpindahan dana dari sektor individu atau badan ke sektor publik. Tugas pemerintah adalah mengumpulkan dan mendistribusikan pajak tersebut. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pemungut pajak, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat secara luas, seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Pelayanan-pelayanan ini memiliki manfaat yang berhubungan dengan kepentingan publik. Namun, pada kenyataannya, individu

¹ Beloa, Bertha., dkk, *Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)*, JUARA: Jurnal Riset Akuntansi, Vol 9 No 2 (2019), <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600>, Hlm, 26

yang memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dibandingkan dengan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Subsidi atau *Transfer (Transfer Payment)*

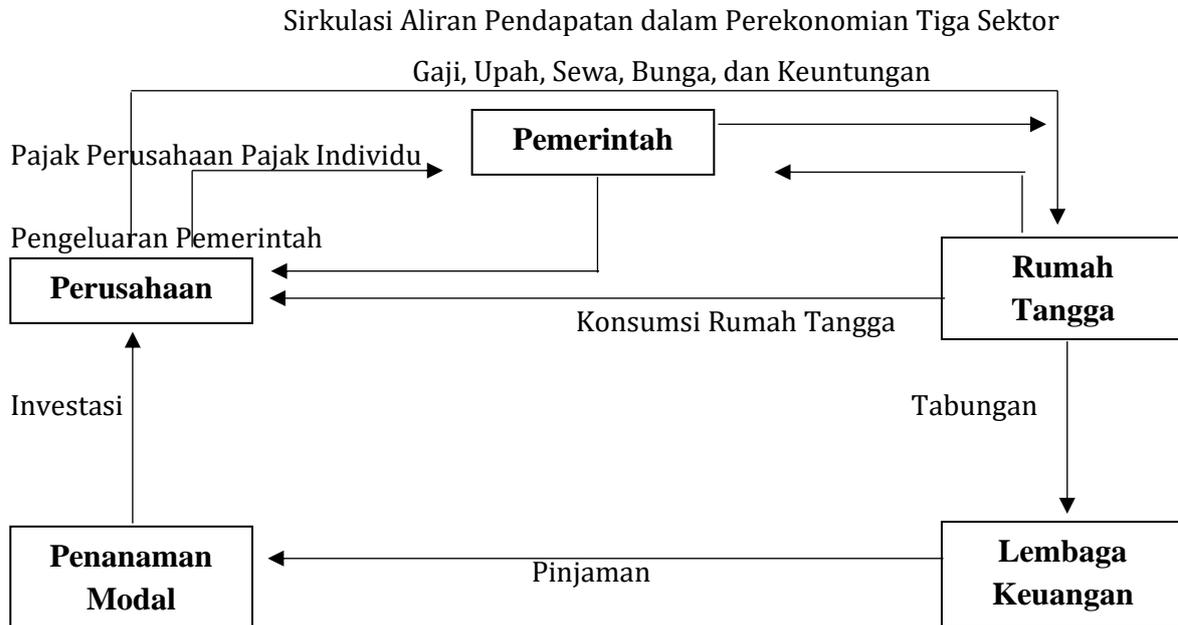
Subsidi adalah bentuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan tertentu. Dalam konteks subsidi, masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya. Subsidi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat atau konsumen. Berbagai jenis subsidi antara lain tunjangan pengangguran, jaminan sosial, hibah, bantuan, hadiah, dan bentuk bantuan lainnya.

Peran dan fungsi perekonomian tiga sektor atau lazim disebut sebagai perekonomian yang didalamnya terdapat kontribusi aktif dari pemerintah, dimana hal tersebut akan menyebabkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah merupakan sumber utama pendapatan pemerintah. Pemerintah berperan dalam perekonomian sebagai penyedia barang publik, dan pembiayaan diperlukan untuk memastikan penyediaan barang tersebut. Dalam menjalankan tindakan ini, pemerintah mengumpulkan dana melalui proses pengumpulan pajak dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai kegiatan pembangunan.
2. Berikutnya adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor korporasi. Pengeluaran ini mencerminkan bahwa pemerintah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor korporasi.
3. Terakhir, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini terjadi karena pemerintah memberikan kompensasi kepada komponen produksi rumah tangga sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan konsumsi mereka.

C. Sirkulasi Aliran Pendapatan pada Perekonomian Tiga Sektor

Sirkulasi pendapatan dan keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor dapat ditunjukkan dan jelaskan pada sebagai berikut:



Keterangan Gambar:

1. Aliran 1: Sektor perusahaan melakukan pembayaran kepada dua kategori. Pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga yaitu berupa pendapatan dari faktor-faktor produksi. Kedua, pembayaran kepada pemerintah berupa pajak perusahaan.
2. Aliran 2: Rumah tangga memperoleh pendapatan melalui dua cara. Pertama, perusahaan membayarkan upah dan gaji, bunga, dan keuntungan, serta sewa kepada rumah tangga. Kedua, pemerintah membayar gaji dan upah kepada rumah tangga yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Aliran 3: Pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pemasukan ini digunakan oleh pemerintah untuk membayar gaji dan upah pegawai serta untuk membeli bahan produksi berupa barang dan jasa dari perusahaan.
4. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga (Y) dimanfaatkan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu: (i) kebutuhan *consumption* (C), (ii) *saving* (S), dan (iii) pembayaran *tax* atau pajak (T).

Persamaannya adalah: $Y = C + S + T$.

5. Pada gambar diatas, secara praktiknya dapat diasumsikan bahwa lembaga keuangan yang menampung tabungan rumah tangga dapat dipinjamkan kepada perusahaan yang membutuhkan modal.
6. Pengeluaran agregat (AE) telah memiliki berbagai jenis, termasuk pengeluaran *consumption* (C), *invest* (I), dan tambahan pengeluaran pemerintah atau *government* (G).

Persamaannya adalah: $AE = C + I + G$.

D. Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Kebijakan Fiskal dan Subsidi

Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan. Salah satu bentuk peran pemerintah yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam adalah kebijakan fiskal, terutama jika dibandingkan dengan kebijakan moneter. Implikasi dari pelarangan riba dan kewajiban membayar zakat menunjukkan pentingnya kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter.² Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan sektor ekonomi melalui pengeluaran dan penerimaan pemerintah.³

Kebijakan fiskal memiliki arti penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengangguran. Dengan penerapan kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan agregat dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan fiskal juga digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran nasional dalam sistem perekonomian. Makna yang dimaksudkan secara khusus terkait dengan kebijakan fiskal meliputi: pengumpulan pendapatan, stimulasi pertumbuhan ekonomi, dan koreksi ketidakseimbangan sementara.

Kebijakan fiskal telah muncul sebagai instrumen utama untuk mencapai kemakmuran nasional, yang meliputi pemanfaatan belanja publik, perpajakan progresif, dan pembiayaan utang untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang diinginkan. Penerimaan dan pengeluaran negara merupakan aspek yang diatur melalui kebijakan fiskal. Penerimaan negara dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh

² Yusrizal, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Medan: FEBI UIN – SU Press, 2019), Hlm.152

³ Aqwa Naser Daulay, dkk, *Ekonomi Makro Islam* (Medan, Febi Press, 2019), Hlm. 79

masyarakat. Selain itu, sumber penerimaan negara lainnya antara lain dari hasil lelang, denda, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Kebijakan fiskal pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Definisi dari kedua jenis kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan ekonomi yang melibatkan pengurangan penerimaan pemerintah, seperti pajak, dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk menstimulasi output.
- Kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapatan agar lebih besar daripada pengeluaran. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi tingkat daya beli yang dimiliki oleh masyarakat dan mengatasi masalah inflasi yang terjadi.

Adapun hubungan keterkaitan antara syarat keseimbangan pendapatan nasional dengan kebijakan fiskal dan subsidi, keseimbangan ekonomi 3 sektor, serta keseimbangan pajak lump sum dan proposional dengan subsidi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Keseimbangan Pendapatan Nasional Dengan Kebijakan Fiskal dan Subsidi

Analisis telah mengungkapkan bahwa sesuatu dalam perekonomian Mencapai keseimbangan pendapatan nasional mensyaratkan bahwa: "penawaran agregat dan pengeluaran harus sama. Nilai hasil produksi barang dan jasa dalam perekonomian selama periode tertentu sama dengan pendapatan nasional (Y) dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan dengan pihak luar negeri. Pengeluaran yang dilakukan secara kolektif atau oleh beberapa pihak dalam perekonomian tersebut.⁴

2. Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor

Mencakup tiga kategori pembelian yang berbeda: rumah tangga konsumsi atau *consumption* (C). Pemerintah atau *government* (G) dan perusahaan investasi atau *invest* (I) bersama-sama membeli produk dan jasa. Sehingga kondisi berikut mengarah pada keseimbangan pada ekonomi 3 sektor: Penawaran gabungan I = Pengeluaran Agregat, atau $Y = C + I + G$ Aliran pendapatan untuk rumah tangga akan dihasilkan oleh aktivitas sektor bisnis dalam menciptakan produk dan jasa (gaji dan upah, bunga, dan keuntungan, serta sewa), dan nilai arus ini akan sama dengan pendapatan

⁴ Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islami (5th ed)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)

nasional (Y). Tiga hal yang akan dilakukan dengan pendapatan rumah tangga: membiayai *consumption* (C), mendorong *saving* (S), dan membayar pajak atau *tax* (T). Dengan demikian, kesejajaran berikut berlaku berdasarkan tiga sektor arus pendapatan perekonomian saat ini:

$$Y=C+S+T$$

Penjelasan di atas telah menunjukkan bahwasanya ia seimbang, sehingga persamaan berikut ini benar: $Y=C+I+G$.

$$C+I+G=C+S+T$$

$I+G=S+T$ jika C (*consumption*) dikurangi dari setiap setengahnya. Tiga sektor I dan G dalam perekonomian merupakan sumber pendapatan baru yang disuntikkan ke dalam sistem. S dan T bocor. Akibatnya, suntikan Kebocoran neraca adalah pembatasan lain yang diberlakukan oleh ekonomi tiga sektor. Kondisi berikut harus dipenuhi dalam ekonomi tiga sektor agar keseimbangan tercapai: $3 Y-C+I+G, I+G-S+T$

3. Keseimbangan Dengan Kebijakan Fiskal (Pajak Lump Sum dan Proporsional) dan Subsidi

Pajak penghasilan dapat dikenakan dengan menggunakan dua tarif, yaitu pajak proporsional dan pajak progresif. Pajak proporsional mengacu pada sistem tarif pajak yang diterapkan dengan tarif pajak tetap untuk semua tingkat pendapatan. Penurunan kesejahteraan yang disebabkan oleh pajak akan lebih rendah ketika waktu luang dimasukkan ke dalam basis pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang sama. Penurunan usaha tenaga kerja berkurang karena menghindari efek substitusi dari tarif. Efek yang dihasilkan oleh pajak ini mirip dengan pajak lumpsum, yaitu tanpa kerugian ekonomi yang disebabkan oleh *deadweight loss*. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini cukup menantang karena sulitnya mengukur nilai waktu luang. Ketika menggunakan tarif pajak progresif, tarif pajak marjinal akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pajak penghasilan dikatakan memiliki tarif progresif ketika persentase pajak (relatif terhadap pendapatan) meningkat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.⁵

Pemerintah tidak hanya memungut pajak tetapi juga memberikan kembali kepada masyarakat melalui transfer dan hadiah. Dengan rumus $Y_d=Y-T+Tr$,

⁵ Yoshanda, Agung Andana, *Pendapatan Nasional*, Artikel. FST Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2020

pembayaran transfer akan mengubah pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengubah pendapatan nasional berimbang. Seperti yang terjadi Kami membedakan dua skenario untuk model ekonomi tiga sektor: skenario pengganda dengan pajak proporsional $T-TO + Y$ (endogen) dan skenario penggandaan dengan TTO pajak lump sum.⁶

$$Y = C + I + G$$

$$Y = a + b Y_d + 1 - G$$

$$Y = a + b (Y - T_x + T_r) + 1 + G$$

$$Y = a + bY - bT_x + bT_r + 1 + G$$

$$(1 - b) Y - a - bT_x + bT_r + 1 + G$$

$$Y = \frac{a - bT_x + bT_r + 1 + G}{(1 - b)}$$

Contoh: Peran pemerintah sebesar 250, pendapatan/pajak pemerintah sebesar 250, dan fungsi investasi sebesar 50 inkremen. Akibatnya, neraca pendapatan nasional adalah 1000. Rumus berikut digunakan untuk menentukan neraca pendapatan nasional.⁷

- Pendekatan Pengeluaran

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0.8Y_d + 50 + 250$$

$$Y = 400 + 0.8(Y - 250)$$

$$Y = 400 + 0.8Y - 200$$

$$Y = 200 + 0.8Y$$

$$(1 - 0.8) Y = 200$$

$$0.2Y - 200$$

$$Y = 1000$$

- Pendekatan Injeksi kebocoran

$$S + T_x - 1 - G$$

$$C = 100 + 0.8Y_d$$

$$C = 100 + 0.8(Y - 250)$$

⁶ Rohmawati, Ita, *Ekonomi Makro Islam. Pekalongan: Nasya Expanding Management*, 2021, Hlm. 32

⁷ Aryanti, Lutfia Tri, *Perekonomian Tiga Sektor dalam Ekonomi Makro Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: UIN Sumatera Utara. (<https://id.scribd.com/document/438044741/Perekonomian-3-Sektor-Dalam-Ekonomi-Islam>, 2019), diakses pada 17 Mei 2023.

$$C = 100 + 0.8 Y - 200$$

$$C = 100 + 0.8 Y$$

$$S = 100 + 0.2 Y$$

$$100 + 0.2 Y = 50 + 250$$

$$0.2 Y = 200$$

$$Y = 1000$$

Jika soal di atas, dengan penambahan transfer $Tr=50$ maka pendapatan nasional yang baru adalah:

$$Y = CH + G$$

$$Y = 100 + 0.8 Y_d + 50 + 250$$

$$Y = 400 + 0.8 (Y - 250 + 50)$$

$$Y = 400 + 0.8 Y + 200 + 40$$

$$Y = 240 + 0.8 Y$$

$$(1 - 0.8) Y = 240$$

$$0.2 Y = 240$$

$$Y_{eq} = 1200$$

kemudian jika untuk fungsi disposable income (Y_d) untuk pajak proporsional sebagai berikut:

$$Y_d = Y - T_x + Tr$$

$$Y_d = Y - (T_x + y) + Tr$$

$$Y_d = Y - T_x - 1Y + Tr$$

Substitusi persamaan Y_d di atas dengan persamaan perekonomian 3 sektor adalah sebagai berikut:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = a + b Y_d + I + G$$

$$Y = a + b (Y - T_x - 1Y - Tr) + I + G$$

$$Y = a + b Y - b T_x + b Tr + 1 + G$$

$$(1 - b + b T_x) Y = a - b T_x + b Tr + 1 + G$$

$$Y = \frac{a - b T_x + b Tr + 1 + G}{(1 - b + b T_x)}$$

E. Multiplier Effect (Angka Pengganda) Pada Perekonomian Tiga Sektor

Penggandaan ekonomi, atau *multiplier effect*, adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan dampak pengeluaran baru terhadap perekonomian secara keseluruhan. Konsep ini mengasumsikan bahwa setiap unit pengeluaran baru akan menciptakan efek berantai, di mana uang yang dihabiskan akan berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya, menciptakan pendapatan dan pengeluaran baru di setiap tahap. Angka pengganda ekonomi ini menunjukkan seberapa besar dampak pengeluaran baru terhadap perekonomian secara keseluruhan. Semakin tinggi angka pengganda ekonomi, semakin besar efek pengeluaran baru tersebut.⁸

Angka pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian tiga sektor adalah konsep yang menggambarkan dampak ekonomi dan peningkatan pengeluaran atau investasi di satu sektor terhadap pendapatan dan output secara keseluruhan dalam perekonomian. Konsep ini melibatkan efek berganda, di mana peningkatan pengeluaran oleh satu sektor akan merangsang pertumbuhan di sektor lain melalui hubungan permintaan dan pasokan.⁹ Untuk menghitung angka pengganda, metode yang umum digunakan adalah pendekatan Input-Output. Pendekatan ini melibatkan pembuatan tabel input-output yang menggambarkan aliran barang dan jasa antara sektor-sektor ekonomi. Dengan menggunakan tabel input-output, angka pengganda dapat dihitung dengan mengukur dampak akhir dari peningkatan pengeluaran pada pendapatan dan output agregat.¹⁰

Angka pengganda adalah suatu konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel tertentu dengan variabel pendapatan nasional. Jika angka pengganda tinggi, maka perubahan pada variabel tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang ditunjukkan dengan koefisien pengganda. Angka pengganda atau *multiplier effect* menunjukkan perbandingan antara besarnya kenaikan atau penurunan pendapatan nasional dengan besarnya kenaikan atau penurunan pengeluaran agregat yang menyebabkan perubahan pendapatan itu. Perubahan

⁸ Gustina, *Analisis Multiplier Effect Tambak Udang Terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, 2014. https://repository.radenintan.ac.id/1416/1/Skripsi_Gustina.pdf. Diakses pada 29 Juni 2023

⁹ Setiawati, E., Syafariansyah, R., Furiawan, L., Setiani, K., & Nirwany, H., Analisis Multiplier Effect Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomika*, 8(1), 8 (2019), Hlm 14

¹⁰ Purwanti, Evi Yulia, *Disinsentif Bekerja Karena Pajak Penghasilan?.*" *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)* 1.Nomor 2 (2004), Hlm. 82

pendapatan nasional ditunjukkan dengan angka pengali yang disebut koefisien pengali.¹¹ Pengganda adalah rasio yang tepat antara pendapatan dan investasi, serta jumlah kerja dan tenaga kerja yang digunakan dalam investasi langsung. Pengganda atau efek pengganda adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan pengeluaran agregat yang berkontribusi pada perubahan pendapatan nasional tersebut. Jika nilai pengganda tinggi, maka perubahan pada variabel tersebut akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan nasional, begitu pula sebaliknya.¹²

Dalam perekonomian tertutup dengan persamaan $Y = C + I$, hanya terdapat satu pengganda yang dikenal, yaitu pengganda investasi. Namun, dalam perekonomian dengan persamaan $Y = C + I + G$, terdapat beberapa jenis pengganda yang dikenal, seperti pengganda investasi, pengganda konsumsi, pengganda pengeluaran konsumsi pemerintah, pengganda transfer pemerintah, pengganda pajak, dan pengganda anggaran belanja berimbang.¹³ Dalam konteks ekonomi tiga sektor, fluktuasi investasi tidak hanya berdampak pada perubahan total pengeluaran, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan dalam pajak dan pengeluaran pemerintah. Fokus pembahasan ini hanya tertuju pada efek multiplier dari perubahan investasi, perubahan pengeluaran pemerintah, dan perubahan pajak.¹⁴

1. Multiplier Investasi

Multiplier investasi dalam perekonomian tiga sektor mengacu pada konsep yang menjelaskan dampak perubahan investasi terhadap pendapatan nasional dalam konteks perekonomian yang melibatkan tiga sektor utama, yaitu sektor rumah tangga (konsumsi), sektor bisnis (investasi), dan sektor pemerintah (pengeluaran pemerintah). Ketika terjadi perubahan dalam investasi agregat, hal tersebut akan mempengaruhi pengeluaran agregat dan akhirnya memengaruhi pendapatan nasional secara keseluruhan. Dalam perekonomian tiga sektor, multiplier investasi menunjukkan seberapa besar perubahan dalam pendapatan nasional yang dihasilkan

¹¹ Putong, Iskandar. "Ekonomi Makro." *Pengantar untuk dasar-dasar ilmu dalam ekonomi makro 1* (2015), Hlm. 75

¹² Modeling. Edward Elgar Publishing. 2. Miller, R. E., & Blair, P. D, Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (2nd ed.). Cambridge University Press, 2013, Hlm. 43

¹³ Hapsari, T. D., Muniarty, P., Junaedi, I. W. R., Rabbani, D. B., Gemilang, F. A., Butarbutar, D. J. A., ... & Wasil, M, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Get Press, 2022), Hlm 12

¹⁴ Zakaria, J, *Pengantar teori ekonomi makro*. Gaung Persada (GP Press, 2009), Hlm, 25

oleh perubahan dalam investasi agregat. Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional, sementara penurunan investasi akan berdampak sebaliknya.¹⁵

Pendapatan nasional dapat berubah karena adanya perubahan pada investasi. Jika terjadi penambahan investasi (dari I menjadi I + I), maka akan terjadi penambahan pendapatan (dari Y menjadi Y + Y = Y1). Artinya, perubahan pada investasi dapat mempengaruhi pendapatan nasional dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena investasi dianggap sebagai injeksi yang dapat menambah pendapatan nasional sebagai berikut:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = c_0 + cY_d + I + G$$

$$Y = c_0 + c(Y - T) + I + G$$

$$Y = c_0 + cY - cT + I + G$$

$$Y - cY = c_0 - cT + I + G$$

$$Y = \frac{1}{1 - c} (c_0 - cT + I + G)$$

Perubahan pada investasi dapat mempengaruhi pendapatan nasional dalam perekonomian. Selain itu, perubahan pada investasi juga dapat mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional melalui multiplier perubahan investasi, jika terjadi penambahan investasi (dari I menjadi I + I), maka akan terjadi penambahan pendapatan (dari Y menjadi Y + Y = Y1). Hal ini menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam perekonomian dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja sehingga persamaannya sebagai berikut:¹⁶

$$Y_1 = C + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = c_0 + cY_d + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = c_0 + c(Y - T) + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = c_0 + cY - cT + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 - cY = c_0 - cT + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = \frac{1}{1 - c} (c_0 - cT + I + \Delta I + G)$$

¹⁵ Kusmanto, Heri, dan Warjio. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020), Hlm 40

¹⁶ Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. *Macroeconomics (12th ed.)*, McGraw-Hill Education, 2014

Akibatnya, meningkatkan investasi ΔI akan meningkatkan pendapatan Y .
Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\Delta Y = Y_1 - Y = \frac{1}{1-c} \times \Delta I$$

Sehingga nilai multiplier:

$$\Delta Y / \Delta I = \frac{1}{1-c} \text{ atau } \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS}$$

Sebelum ada tambahan investasi, pendapatan nasional adalah sebagai berikut bila menggunakan sistem pajak proporsional:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = c_0 + cY_d + I + G$$

$$Y = c_0 + c(1-t)Y + I + G$$

$$Y = c_0 + cY - ctY + I + G$$

$$Y - cY + ctY = c_0 + I + G$$

$$Y(1 - c + ct) = c_0 + I + G$$

$$Y = \frac{1}{1-c+ct} (c_0 + I + G)$$

Persamaannya menjadi jika investasi meningkat sebesar ΔI , menyebabkan peningkatan pendapatan nasional sebesar Y_1 , maka:

$$Y_1 = c_0 + cY_d + I + \Delta I + G$$

$$= c_0 + c(1-t)Y_1 + I + \Delta I + G$$

$$= c_0 + cY_1 - ctY_1 + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 (1 - c + ct) = c_0 + I + \Delta I + G$$

$$Y_1 = \frac{1}{1-c+ct} (c_0 + I + \Delta I + G)$$

Maka kenaikan pendapatan nasional sebesar ΔY yaitu:

$$\Delta Y = Y_1 - Y = \frac{1}{1-c+ct} \times \Delta I$$

Multiplier Investasi dengan pajak proporsional adalah:

$$K_I = \frac{1}{1-c+ct} = \frac{1}{1-c(1-t)}$$

Contoh:

Jika diketahui: $MPC = c = 0,75$

Pajak proporsional $t = 0,20$

Tambahan Investasi adalah Rp 20 miliar

Hitunglah Multiplier dengan sistim pajak tetap:

$$K_I = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{MPS}$$

$$K_I = \frac{1}{1-0,75} = \frac{1}{0,25} = 4$$

Multiplier dengan sistim pajak proporsional:

$$K_I = \frac{1}{1-c-ct}$$

$$K_I = \frac{1}{1-0,75+0,75(0,20)}$$

$$K_I = \frac{1}{1-0,75+0,15}$$

$$K_I = \frac{1}{0,40} = 2,5$$

2. Multiplier Pengeluaran Pemerintah

Multiplier pemerintah adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi output atau pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor, yaitu sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dalam hal ini, semakin besar nilai multiplier pemerintah, semakin besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output atau pendapatan nasional. Multiplier pemerintah sendiri merupakan rasio perubahan output atau pendapatan nasional terhadap perubahan pengeluaran pemerintah.¹⁷ Pendapatan nasional dapat mengalami perubahan atau peningkatan karena adanya penambahan pengeluaran pemerintah. Pada tahap awal proses multiplier, penambahan investasi akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Begitu juga, proses multiplier pada pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional. Dalam sistem pajak tetap, multiplier pengeluaran pemerintah dapat dihitung sebagai berikut:

$$K_G = \frac{1}{1-c} \text{ atau } \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS}$$

Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan nasional atau ΔY :

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c} \times \Delta G$$

¹⁷ Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu, "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo". *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021.

Nilai pengganda pengeluaran pemerintah dalam sistem pajak proporsional adalah sebagai berikut:

$$K_G = \frac{1}{1-c+ct} \times \Delta G$$

Oleh karena itu, peningkatan pendapatan nasional sebesar ΔY dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini:

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c+ct} \times \Delta G$$

3. Multiplier Pajak

Multiplier pajak adalah konsep yang menggambarkan dampak perubahan dalam tingkat pajak terhadap perekonomian secara keseluruhan dalam konteks perekonomian tiga sektor. Ini mengacu pada efek penggandaan perubahan dalam tingkat pajak terhadap output atau pendapatan agregat. Saat tingkat pajak naik atau turun, multiplier pajak menjelaskan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah.¹⁸ Multiplier pajak adalah sebuah konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan pajak dapat mempengaruhi output atau pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor. Dalam hal ini, semakin besar nilai multiplier pajak, semakin besar pengaruh perubahan pajak terhadap output atau pendapatan nasional. Multiplier pajak sendiri merupakan rasio perubahan output atau pendapatan nasional terhadap perubahan pajak. Konsep multiplier pajak ini merupakan bagian dari konsep *multiplier effect* yang lebih luas, yang juga mencakup efek berganda pada investasi, pengeluaran pemerintah, dan subsidi pemerintah.¹⁹

Perubahan pajak memiliki efek yang berbeda terhadap perubahan pendapatan nasional, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Perubahan pajak mempengaruhi pendapatan yang tersedia untuk digunakan dan, sebagai akibatnya, memengaruhi konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, pada gilirannya, berdampak pada pendapatan nasional. Dalam sistem pajak tetap, jika pajak meningkat sebesar ΔT , maka

¹⁸ Setiawati, E., Syafariansyah, R., Furiawan, L., Setiani, K., & Nirwany, H., Analisis Multiplier Effect Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomika*, 8(1), 8 (2019)

¹⁹ Abidin, Z., Muhaemin, A., & Salam, A, *Pengantar Ekonomi Makro*, CV Latinulu, 2020)

pendapatan yang tersedia untuk digunakan (Y_d) akan berkurang sebesar ΔT . Sebagai hasilnya, pengeluaran agregat akan mengalami penurunan sebesar [nilai ΔT]:

$$\Delta C = \Delta AE = MPC \times \Delta T$$

Apabila pajak diturunkan sebesar ΔT , maka konsumsi dan pengeluaran agregate akan bertambah sebesar:

$$\Delta C = \Delta AE = \Delta c_t$$

Formula untuk menghitung persamaan pendapatan nasional sebelum adanya perubahan pajak dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \frac{1}{1-c} (c_0 - cT + I + G)$$

Dengan demikian, pendapatan nasional yang baru setelah terjadinya perubahan pajak dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \frac{1}{1-c} (c_0 - cT + c\Delta T + I + G)$$

$$\Delta Y = Y_1 - Y \text{ atau}$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c} (c\Delta T)$$

$$\Delta Y = \frac{c}{1-c} (\Delta T)$$

Dari persamaan di atas, penurunan pajak sebesar ΔT akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar ΔY . Dan multiplier perubahan pajak dapat dihitung sebagai:

$$K_T = \frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{c}{1-c} \text{ atau } K_T = \frac{MPC}{1-MPC}$$

Dalam sistem pajak proporsional, jika pajak yang dikurangi sebesar ΔT , maka konsumsi dan pengeluaran agregat akan mengalami peningkatan sebesar:

$$\Delta C = \Delta AE = c\Delta T$$

Pendapatan nasional yang terbaru karena pengurangan pajak dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini:

Persamaan sebelum pengurangan pajak:

$$Y = \frac{1}{1-c+ct} (c_0 + I + G)$$

Persamaan setelah pengurangan pajak:

$$Y_1 = \frac{1}{1-c+ct} (c_0 + c\Delta T + I + G)$$

Pertambahan pendapatan nasional adalah $\Delta Y = Y_1 - Y$ atau

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c+ct} (c\Delta T) \text{ atau}$$

$$\Delta Y = \frac{c}{1-c+ct} (\Delta T)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, multiplier pajak proporsional dapat ditemukan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$K_T = \frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{c}{1-c+ct}$$

Dengan demikian, penurunan pajak sebesar ΔT akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar $\frac{c}{1-c+ct}$ dikalikan dengan besarnya pengurangan pajak yaitu ΔT .

E. Keseimbangan Perekonomian Tiga Sektor dengan Variabel Zakat dan Infak

Keseimbangan ekonomi tiga sektor mengacu pada hubungan yang seimbang antara sektor publik, sektor swasta, dan sektor rumah tangga dalam suatu perekonomian. Zakat dan infak adalah variabel yang dapat mempengaruhi keseimbangan ini, terutama dalam konteks ekonomi berbasis agama, seperti dalam ekonomi Islam.²⁰ Pengaruh variabel zakat dan infak dalam perekonomian tiga sektor:

1. Sektor Pemerintah

Penerimaan zakat oleh sektor pemerintah dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Zakat dapat berperan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah, sehingga memungkinkan mereka untuk meningkatkan pengeluaran pada sektor-sektor tersebut dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik.²¹ Pemberian infak kepada sektor publik juga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah pada program-program sosial dan pembangunan. Infak yang diberikan secara sukarela oleh individu, perusahaan, atau lembaga dapat membantu memperkuat peran pemerintah dalam memfasilitasi pelayanan publik yang lebih baik dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Sektor Perusahaan

Di sektor perusahaan, perusahaan dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi dengan menggalang dana zakat dari karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Pengumpulan dan pengelolaan zakat secara efektif dapat memungkinkan

²⁰ Novita, Y., Wafiratulaela, W., Wicaksono, P. N., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y, Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol 6 No 1 (2022), Hlm. 81

²¹ Adinugraha, Hendri Hermawan dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021)

perusahaan untuk mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti masyarakat yang membutuhkan, pekerja yang kurang mampu, atau dalam bentuk investasi sosial. Hal ini dapat meningkatkan keseimbangan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Perusahaan juga dapat menggunakan sebagian keuntungannya untuk memberikan infaq kepada masyarakat atau program-program sosial. Dalam melakukan ini, perusahaan dapat membantu meningkatkan keseimbangan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dampak positif pada lingkungan di sekitarnya. Tindakan ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut.²²

3. Sektor Rumah Tangga

Pada tingkat rumah tangga, pembayaran zakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan antara orang-orang yang mampu dan mereka yang membutuhkan. Zakat yang diberikan secara wajib oleh individu atau keluarga dapat membantu memperbaiki distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat, serta mendorong kesejahteraan yang lebih merata. Selain zakat, individu dan keluarga juga dapat memberikan infaq sebagai bentuk kontribusi sukarela dalam mendukung program-program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan infaq, sektor rumah tangga juga berperan dalam menciptakan keseimbangan ekonomi.²³ Dalam konsep perekonomian Islam, membayarkan zakat dan infak perlu diperhitungkan dari masyarakat yang mampu untuk masyarakat yang kurang mampu. Apabila masyarakat kurang mampu belum memiliki pendapatan, maka zakat adalah pendapatan utama baginya. Maka:

$$I = IO$$

$$G = G0$$

$$Tx = T0 + tY$$

$$Tr = Tr$$

$$C1 = a + b (Y - T0 - tY + Tr - (zY + fY))$$

²² Munandar, Eris dkk, *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 01 , No. 01 (2020), Hlm. 26

²³ *Ibid*, 27

$$= a + bY - bT0 - btY + bTr - bzY - bfY$$

$$\text{Jika } Y = C1 + C2 + I0 + G0$$

$$\text{Dan } C2 = zY + fY$$

Maka :

$$Y = a + bY - bT0 - btY + bTr - bzY - bfY + I0 + G0 + zY + fY$$

$$Y = \frac{1}{1-b(1-t)-(1-b)(z+f)} a - bT0 + bTr + I0 + G0$$

PENUTUP

Simpulan

Analisis ekonomi nasional dapat diperluas menjadi tiga sektor dengan memasukkan perans pemerintah. Sektor ekonomi ketiga disebut sebagai ekonomi yang tidak stabil karena tidak ada perdagangan internasional. Dalam kasus pemerintah, ada dua variabel baru, yaitu pajak dan transfer (pembayaran transfer/subsidi), yang mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Kontribusi wajib kepada negara dikenal sebagai pajak dan dilakukan oleh individu dan perusahaan. Pemerintah menggunakan pajak untuk menilai kebutuhan negara dan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, sedangkan transfer adalah jenis bantuan yang diberikan pemerintah yang diterima oleh masyarakat umum tanpa perlu penyelidikan lebih lanjut. Transfer dapat berupa tunjangan pengangguran, jaminan sosial, hibah, bantuan, hadiah, dan lain-lain. Ketika produksi dan konsumsi agregat dikoordinasikan, pendapatan bersih nasional di tiga sektor ekonomi meningkat. Dalam situasi ini, istilah "agregat" digunakan untuk merujuk pada pendapatan nasional (Y), sedangkan istilah "agregat" digunakan untuk merujuk pada konsumsi domestik (C).

Saran

Penulis menyadari betul tulisan kami masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami terima sebagai bahan introspeksi diri dan motivasi untuk kedepannya dapat menerbitkan karya yang lebih baik. Adanya tulisan ini diharap dapat membantu pembaca dalam memahami konsep ekonomi 3 sektor dan hubungannya dengan kebijakan fiskal dan subsidi, serta zakat dan infak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Muhaemin, A., & Salam, A. (2020). Pengantar Ekonomi Makro. CV Latinulu
- Adinugraha, Hendri Hermawan dkk. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Aqwa Naser Daulay, dkk, ekonomi makro islam (Medan, Febi Press, 2019)
- Aryanti, Lutfia Tri. 2019. Perekonomian Tiga Sektor dalam Ekonomi Makro Islam. Fakultas Ekonomi dan bisnis: UIN Sumatera Utara. (<https://id.scribd.com/document/438044741/Perekonomian-3-Sektor-Dalam-Ekonomi-Islam>), diakses pada 17 Mei 2023.
- Beloan, Bertha., dkk, (2019) Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPH 21 dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara), *JUARA: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 9 No 2 <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600>,
- Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2014). *Macroeconomics* (12th ed.). McGraw-Hill Education
- Gustina. (2014). Analisis Multiplier Effect Tambak Uang Terhadap Perekonomian Masyarakat Ditinjau Dari Ekonomi Islam. https://repository.radenintan.ac.id/1416/1/Skripsi_Gustina.pdf. Diakses pada 29 Juni 2023
- Hapsari, T. D., Muniarty, P., Junaedi, I. W. R., Rabbani, D. B., Gemilang, F. A., Butarbutar, D. J. A., ... & Wasil, M. (2022). *Pengantar Ekonomi Makro*. Get Press.
- Karim, Adiwarmanto A. (2013). *Ekonomi Makro Islami (5th ed)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kusmanto, Heri, dan Warjio. *Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Malang: IAI Sunan Kalijogo Malang Press, 2020.
- Modeling. Edward Elgar Publishing. 2. Miller, R. E., & Blair, P. D. (2013). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Munandar, Eris dkk. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 01 , No. 01 (2020), hal. 25-38
- Novita, Y., Wafiratulaela, W., Wicaksono, P. N., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y. (2022). Analisis Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Sektor Ekonomi Melalui Finalisasi Kebijakan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).
- Purwanti, Evi Yulia. "DISINSENTIF BEKERJA KARENA PAJAK PENGHASILAN?." *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)* 1.Nomor 2 (2004): 81-94.
- Putong, Iskandar. "Ekonomi Makro." *Pengantar untuk dasar-dasar ilmu dalam ekonomi makro 1* (2015).
- Rohmawati, Ita. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management

Setiawati, E., Syafariansyah, R., Furiawan, L., Setiani, K., & Nirwany, H. (2019). Analisis Multiplier Effect Pajak, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomika*, 8(1), 8.

Yoshanda, Agung Andana. (2020). *Pendapatan Nasional*. Artikel. FST Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Yusrizal, dkk, *ekonomi makro islam*, (Medan: FEBI UIN – SU Press, 2019)

Yuwita, Nurma, Sri Astutik, Siti Badriyatul, and Sri Rahayu. "Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem *Online Single Submission* Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo". *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (July 14, 2021): 41-48. Accessed July 30, 2021.

Zakaria, J. (2009). *Pengantar teori ekonomi makro*. Gaung Persada (GP Press).

Zakaria, Junaidin. *Pengantar teori ekonomi makro*. Gaung Persada (GP Press), (2019).